



FACT BRIEF

SERUAN JARING NUSA KEPADA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MOMENTUM KONFERENSI TINGKAT TINGGI PERUBAHAN IKLIM ATAU COP KE-28

**Masyarakat Pesisir di Kawasan Timur
Indonesia Suarakan Keadilan Iklim**

Penulis:

Asmar Exwar
Parid Ridwanuddin
Nirwan Dessibali
M. Yusuf Sangadji

Editor dan Layout:

Muhammad Riszky

Foto:

Arsip anggota Jaring Nusa KTI

Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia

merupakan koalisi dari berbagai organisasi yang fokus terhadap isu pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan dari Jaring Nusa KTI sendiri yakni sebagai ruang belajar, berbagi ide dan pengetahuan serta melahirkan aksi dan produk belajar terkait pesisir dan pulau kecil di KTI. Jaring Nusa KTI dideklarasikan pada 19 Agustus 2021 di Makassar.

Anggota Jaring Nusa Kawasan Timur Indonesia

Yayasan Econusa
WALHI
WALHI Sulawesi Selatan
WALHI Maluku Utara
Yayasan Hutan Biru
Yayasan Konservasi Laut Indonesia
Yayasan Bonebula
Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Tengah
Japesda Gorontalo
Yayasan Suara Nurani Minaesa
KOMNASDESA-SULTRA
Yayasan Pakativa
Tunas Bahari Maluku
Yayasan Jala Ina
Moluccas Coastal Care
Yayasan Tananua Flores
LPSDN Lombok
Perkumpulan Generasi Muda (PGM) Malaumkarta



“Kawasan Timur Indonesia merupakan wajah negara kepulauan Indonesia. Jika kawasan Timur Indonesia rusak, maka wajah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga akan rusak.”

PENGANTAR

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km² dan luas laut 6.4 juta km². Indonesia ditegaskan sebagai negara kepulauan pada Deklarasi Djuanda tahun 1957. Kemudian pada tahun 1982 konsep wilayah wawasan nusantara dapat diterima dan ditetapkan melalui konvensi hukum laut PBB ke-III (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Deklarasi ini dituangkan dalam UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Berdasarkan UNCLOS 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982), Indonesia diberi hak berdaulat (sovereign right) memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta km². Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Namun sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim sebagaimana sedang dihadapi dunia saat ini. Kerentanan ini dapat dilihat di berbagai wilayah pesisir yang mengalami bencana iklim cukup signifikan dalam rentang waktu satu dekade terakhir. Selain itu, faktanya kerusakan sumber daya pesisir dan laut juga cukup masif dan sangat mengkhawatirkan yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat sebagai penduduk di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Kawasan Timur Indonesia merupakan wajah negara kepulauan Indonesia. Data dari BPS tahun 2022 menunjukkan jika terdapat 11.117 pulau kecil yang telah diverifikasi PBB dari jumlah keseluruhan 16.671 pulau. Dengan rincian Papua 556 pulau, Papua Barat 4.324 pulau, Maluku 1.292 pulau, Maluku Utara 863 pulau, Sulawesi Selatan 368 pulau, Gorontalo 127 pulau, Sulawesi Barat 69 pulau, Sulawesi Tengah 1628 pulau, Sulawesi Utara 316 pulau, Sulawesi Tenggara 571 pulau, Nusa Tenggara Barat 407 pulau dan Nusa Tenggara Timur 596 pulau.

Dengan demikian, jika Kawasan Timur Indonesia rusak, maka secara otomatis wajah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia akan rusak.



Pulau Langkai Kota Makassar, salah satu pulau kecil di Kepulauan Spermonde. (Foto: YKL Indonesia)

Ancaman Krisis Iklim

Dunia telah mengalami kenaikan suhu global rata-rata 1,1°C dibandingkan dengan periode pra-industri dan diperkirakan akan melampaui suhu 1,5°C pada awal dekade 2030. Standar internasional yang dikeluarkan oleh United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yaitu maksimal kenaikan suhu bumi 1,5. Dialog dan perdebatan pada KTT Iklim atau COP bahkan hingga di Glasgow maupun di el-Sheikh masih di dominasi oleh bagaimana komitmen dan kesepakatan strategi bersama oleh para delegasi menahan suhu global 1,5°C.

WHO melaporkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan secara sosial dan lingkungan, udara bersih, air minum yang aman, makanan yang cukup dan tempat tinggal yang aman. Antara tahun 2030 dan 2050, perubahan iklim diperkirakan akan menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan per tahun, akibat kekurangan gizi, malaria, diare, dan tekanan panas. Kerugian langsung akibat kerusakan kesehatan (tidak termasuk biaya di sektor-sektor yang menentukan kesehatan seperti pertanian dan air dan sanitasi), diperkirakan berjumlah antara US\$ 2-4 miliar/tahun pada tahun 2030.¹

Bencana Iklim dan Kerentanan Indonesia

Sekitar 50-75% dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa di tahun 2100. (IPCC, 2022). Setidaknya terdapat tiga hal mendasar dari dampak perubahan iklim global yang dikenal sebagai triple planetary crisis, yakni polusi udara, hilangnya keanekaragaman hayati dan peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi.

Sumber di Bappenas yang juga mengutip beberapa sumber menyebutkan bahwa polusi udara dinobatkan sebagai penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia yang menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengancam kesehatan manusia dan jasa ekosistem. Saat ini, sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan.

Di Indonesia, Peningkatan Intensitas Kejadian Bencana Hidrometeorologi terjadi dalam kurun 2011–2021. 5.402 kejadian bencana alam pada tahun 2021. 98%–99% dari total jumlah kejadian bencana alam adalah bencana hidrometeorologi. Potensi kerugian ekonomi di Indonesia pada 4 (empat) sektor kunci (2020–2024) adalah Rp 544 triliun akibat dampak perubahan iklim, jika tidak ada intervensi kebijakan (business as usual). Potensi kerugian sektor pesisir dan laut Rp 408 Triliun, sektor sumber daya air Rp 28 triliun, pertanian Rp 78 triliun dan Kesehatan Rp 31 triliun.

Sementara dari informasi BNPB, menunjukkan bahwa tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam telah mengalami kenaikan hingga 82% jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2022. Dari data yang dihimpun BNPB pada lima bulan di awal tahun 2023, sudah terjadi 1.675 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%. Peningkatan suhu global memicu tren kenaikan tinggi muka laut dan terjadi peningkatan frekuensi kejadian banjir dari laut (rob) kemudian diperparah oleh kerusakan ekosistem pesisir. BNPB menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah kejadian bencana banjir rob meningkat 46% dari 35 kali kejadian di tahun 2020 menjadi 75 kejadian di 2022.²

Pada Awal 2023, BNPB meluncurkan indeks risiko bencana Indonesia 2022. Indeks ini didasarkan pada kajian ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah provinsi dan kabupaten kota menghadapi bencana. Dari 514 Kabupaten kabupaten/kota terdapat 192 kabupaten/kota dengan indeks risiko tinggi. Tiga kabupaten/kota dengan skor tertinggi adalah Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Maluku Utara dan Maluku merupakan dua provinsi yang bercirikan wilayah kepulauan di KTI.

Dalam laporan IRBI BNPB tercatat jumlah kejadian bencana sebanyak 3.544 kejadian, yang terdiri dari bencana banjir (1.531 kejadian), cuaca ekstrim (1.068 kejadian), tanah longsor (634 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (252 kejadian), gempa bumi (28 kejadian), gelombang ekstrim dan abrasi (26 kejadian),

¹ https://www.afro-who-int.translate.google/health-topics/climate-change?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

² <https://www.bnpb.go.id/berita/perubahan-iklim-picu-peningkatan-kejadian-bencana>

kekeringan (4 kejadian), dan erupsi gunungapi (1 kejadian). Sebanyak 6.144.324 jiwa menderita dan mengungsi, 861 jiwa meninggal dunia, 46 jiwa hilang, dan 8.727 jiwa mengalami luka-luka sebagai dampak bencana di tahun ini.

Pada 19 November 2023, BMKG merilis potensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Diprediksi berpotensi terjadi banjir pesisir (rob) di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya pesisir Sumatera Utara, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Tengah dan Maluku.³ Sedangkan pada Desember tahun 2022, banjir rob terjadi 21 wilayah pesisir Indonesia antara lain terjadi di Pesisir Aceh, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau hingga Papua.

WALHI mencatat dalam kurun waktu 2017-2020 lebih dari 5.400 desa di pesisir Indonesia telah terendam banjir rob. Selain krisis iklim yang kian buruk, faktor lain yang menyebabkan bentang alam semakin rentan karena adanya beban industri besar di sepanjang pesisir di Indonesia.

Selain faktor cuaca ekstrim, beberapa wilayah banjir juga disebabkan oleh ekstraksi air tanah yang berlebihan sehingga memicu penurunan muka tanah. WALHI menyebutkan bahwa ekstraksi air tanah berlebihan membuat tanah mengalami penurunan 13-15 sentimeter per tahun. Karena tanah mengalami penurunan, kemudian pada saat yang sama terjadi kenaikan air laut trennya 0,8-1 meter maka terjadi intrusi air laut. Ini menandakan terjadi percepatan desa-desa pesisir tenggelam. Banjir di pesisir berdampak pada aktivitas masyarakat, pelabuhan, pemukiman, serta tambak garam dan perikanan darat.

Kerusakan dan Kehilangan di Wilayah Pesisir

• Pencemaran laut dan sampah

Sampah di laut sudah sangat mengkhawatirkan kehidupan biota serta dapat memberikan multiple effect lainnya kepada manusia. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN-KLHK)

bahwa Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbunan sampah sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 39,63% diantaranya berasal dari timbunan sampah rumah tangga. Sumber timbunan sampah nasional terbesar berikutnya berasal dari perniagaan, yakni 21,07%. Kemudian 16,08% timbunan sampah berasal dari pasar. Sampah plastik dengan proporsi 18,55%.⁵

Keberadaan sampah khususnya sampah plastik menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap kelestarian laut. Menurut penelitian Laurens J.J. Meijer dkk yang dipublikasikan di jurnal Science Advance pada 2021, Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia dengan jumlah sampah 56.333 ton.⁶ Sementara data YKL Indonesia yang dikumpulkan dari berbagai wilayah pesisir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2016 hingga 2023 mengungkap sampah plastik merupakan jenis yang paling mendominasi dengan persentase 28-71%.

Sampah plastik menjadi pembunuh utama ekosistem laut khususnya ekosistem terumbu karang. Hanya butuh waktu 4 hari terumbu karang yang tertutupi sampah plastik akan mengalami kematian.⁷ Keberadaan sampah plastik tidak hanya mengancam ekosistem laut, namun juga manusia. Hasil penelitian Rijal MS, dkk tahun 2021 mengungkap 69 jenis ikan yang diteliti terdapat mikroplastik dalam tubuhnya.⁸

• Kehilangan hutan mangrove

Sejak tahun 1980, Indonesia telah kehilangan luasan mangrove dalam jumlah yang sangat besar. Dokumen The World's Mangroves 1980-2005, sejak tahun 1980, FAO melaporkan penurunan luasan hutan mangrove yang sangat signifikan.⁹ Tahun 1980 luasan mangrove tercatat seluas 4.200.000 ha. Lalu pada tahun 1990 menurun menjadi 3.500.000 ha. ada penurunan seluas 70.000 ha. lalu pada tahun 2000 tercatat luasannya hanya 3.150.000. dari 1990 ke 2000 telah hilang seluas 35.000 hektar. Lalu pada tahun 2005 tercatat hanya 2.900.000 hektar. Dari tahun 2000 ke 2005 telah hilang seluas 50.000 ha. Jadi dalam rentang

³ Laporan IRBI-BNPB, 2023

⁴ <https://maritim.bmkg.go.id/peringatan-warning/peringatan-dini-banjir-rob.pdf>

⁵ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

⁶ <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaz5803>

⁷ <https://core.ac.uk/download/pdf/77620968.pdf>

⁸ <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/semnasbiologi/article/download/758/667/1873>

⁹ <https://www.mongabay.co.id/2022/11/21/diplomasi-mangrove-jokowi-di-ktt-g20-dikritik-lsm-lingkungan/>

waktu 1980-2005 telah hilang hutan mangrove seluas 1.300.000 hektar.

Selanjutnya, merujuk dokumen Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut yang diterbitkan setiap tahun oleh BPS RI, data luasan mangrove di Indonesia sampai dengan tahun 2022, tidak lebih dari 3 juta hektar karena tren kehilangan yang sangat signifikan. Luasan mangrove hanya tercatat seluas 2.320.609,89 hektar. Angka ini berkebalikan dengan klaim pemerintah sendiri yang menyebut luasan mangrove di Indonesia lebih dari 3 juta hektar.¹⁰

Keberadaan hutan Mangrove di Indonesia, terancam oleh kebijakan negara yang tidak mengakui dan melindunginya. Di dalam 28 dokumen Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dilakukan oleh WALHI, tercatat hanya sepuluh provinsi di Indonesia yang mengalokasikan ruang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove. Totalnya tercatat seluas 26.924,27 ha. Sisanya, 18 provinsi di Indonesia tidak mengalokasikan ruang perlindungan dan pengelolaan hutan mangrove di dalam Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Di kawasan timur Indonesia sejumlah provinsi tidak memasukan pengakuan dan perlindungan mangrove ke dalam tata ruang lautnya. Provinsi yang dimaksud adalah Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Tak adanya pengakuan dan perlindungan hutan mangrove ini akan menjadi bom waktu kehancuran pesisir dan pulau kecil, serta masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia, apalagi pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah regulasi yang berbahaya, diantaranya regulasi yang melegalkan penambangan pasir laut.

- **Kerusakan lamun dan terumbu karang**

Luas padang lamun di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 2,8% per tahun atau sekitar 0,4 ha per tahun pada periode 2015-2021. Hal yang sama dengan kondisi kesehatan atau kualitas ekologis padang lamun di perairan Indonesia periode 2018-2021 mengalami penurunan Indeks Kesehatan Ekosistem Lamun (IKEL) yang signifikan, dengan indeks sebesar 0,01 per tahun (BRIN, 2021).¹¹

Kondisi terumbu karang, tak bisa dibilang lebih baik. Di Pulau Kei Kecil dan sekitarnya yang terletak di Provinsi Maluku, mengalami kerusakan terumbu karang.¹² Terumbu karang tersebar di sisi timur-selatan Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, dan pulau-pulau kecil di bagian utara-barat Kepulauan Kei Kecil. Stasiun bagian selatan timur, yang berhadapan langsung dengan sisi barat Kepulauan Kei Besar, memiliki perairan lebih terbuka dengan gelombang dan arus yang kadang cukup kuat. Sebaran terumbu meliputi tipe terumbu tepi (fringing reef) dan gosong karang (patch reef).

Hal yang sama dengan ekosistem terumbu karang yang terus terdegradasi. Hasil pendataan tutupan karang di Utara Pulau Ambon pada keseluruhan stasiun penelitian (Liang, Morella, Hila dan Kaitetu) masuk dalam keadaan buruk/bad (23,61%). (Fahrul Barcinta 2023). Tutupan karang yang buruk di Utara Pulau Ambon ini akan semakin bertambah dengan naiknya tinggi gelombang dan abrasi pantai.

Perubahan iklim menjadi salah satu penyebab utama pada penurunan kondisi ekosistem lamun dan terumbu karang, dampaknya luas dan sulit untuk dikendalikan. Bukti nyata ancaman perubahan iklim telah ditemukan pada tahun 2016 di Perairan Bira Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu peneliti dari Marine Science Diving Club Universitas Hasanuddin menemukan 50 persen terumbu karang mengalami pemutihan massal dan berpotensi mengalami kematian massal karena meningkatnya suhu perairan.



Transplantasi terumbu karang di perairan Haruku. (Foto: Econusa)

¹⁰ <https://www.archive.bps.go.id/publication/2022/11/30/d04f692f953694cedbe91909/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2022.html>

¹¹ https://www.researchgate.net/publication/363652100_Status_Lamun_Indonesia_2021

¹² Giyanto et al, 2021, Data Potensi Terumbu Karang tahun 2021

- **Dampak abrasi terhadap infrastruktur**

Abrasi pantai yang dahsyat telah menimpa wilayah pesisir kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang melingkupi Kecamatan Galesong, Galesong Utara dan Tamasaju. Abrasi pantai yang menggerus daratan pesisir bervariasi antara 2 meter hingga 15 meter. Menggerus wilayah pemukiman masyarakat, dermaga, pemakaman dan fasilitas umum lainnya. Abrasi di pesisir pantai Kabupaten Takalar, dalam beberapa tahun sejak 2016 berlangsung masif. Beberapa desa diantaranya yang mengalami kerusakan parah adalah desa Mangindara, Aeng Batu Batu, Boddia, Mappakalombo, Tamasaju, Sampulungan, Tamalate. Penyebab abrasi kian menguat menimpa pesisir Takalar adalah proyek reklamasi dan tambang pasir laut yang dilakukan sejak tahun 2017, 23 juta kubik pasir laut telah diambil dari laut di sekitar perairan Galesong. Sejumlah 16 izin usaha tambang pasir laut di perairan Galesong dengan total luasan mencakup 34.000 hektar.¹³

- **Penambangan pasir laut**

Sejak 13 Februari 2020, proyek penambangan pasir laut skala besar seluas 1.428 Ha dilakukan di perairan Makassar. Penambangan pasir laut ini dilakukan di zona tambang pasir laut Blok Spermonde yang tepat berada di wilayah tangkap Nelayan Pulau Kodingareng yaitu Copong Lombo, Copong Ca'di, Bonema'lonjo, dan Pungan-grong. PT Royal Boskalis dengan kapal pengerukan Queen of the Netherlands memulai proyek penambangan pada lokasi konsesi PT Alefu Karya Makmur seluas 994.81 Ha dan PT Banteng Laut Indonesia seluas 619.58 Ha, dua dari 12 perusahaan pemilik IUP Operasi Produksi-Eksplorasi Pasir Laut di kepulauan Spermonde.¹⁴

Penambangan pasir laut dilakukan untuk menimbun area reklamasi Proyek Strategis Nasional pembangunan Makassar New Port. Penambangan pasir laut dilaksanakan selama beberapa bulan hingga Agustus 2020. Hal ini telah menghancurkan ekosistem laut yang juga adalah wilayah tangkap nelayan dan menyebabkan kerugian sosio ekonomi yang berkepanjangan bagi masyarakat kepulauan Spermonde. Penambangan pasir laut ini merupakan kelanjutan dari proyek reklamasi pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) dan Makassar New Port (MNP) tahun 2017-2018 yang lalu.

Berbagai macam kerusakan yang terjadi di kawasan pesisir di Indonesia Timur terbukti telah menurunkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap krisis iklim. Dampak jangka panjangnya, situasi ini akan memicu kerentanan yang berlapis-lapis dan memaksa mereka menjadi pengungsi iklim pada masa yang akan datang.



Aksi yang dilakukan oleh warga Pulau Kodingareng terhadap aktivitas penambangan pasir laut tahun 2020. (Foto: WALHI Sulsel/Koalisi Save Spermonde)

¹³ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/01/15/laju-abrasi-pesisir-takalar-yang-kian-parah-belum-terhentikan>

¹⁴ Panraki pa'boya boyangang, Oligarki proyek strategis nasional dan kerusakan laut Spermonde, Koalisi Save Spermonde, 2021



Save Sangihe Island melakukan diskusi bersama para nelayan Pulau Sangihe. (Foto: Jaring Nusa KTI)

Dampak Sosial dan Ekonomi Krisis Iklim

- **Penurunan jumlah nelayan dan durasi nelayan melaut**

Penelitian dari Litbang Kompas (2023) menyebut, pada tahun 2030 jumlah nelayan (dan juga petani) sebanyak 926.492 orang akan meninggalkan pekerjaannya saat ini akibat krisis iklim maupun proyek-proyek iklim.¹⁵ Angka ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi Indonesia sebagai negara bahari sekaligus kepulauan terbesar di dunia.

Tren penurunan jumlah nelayan telah terlihat sejak satu dekade terakhir. Pada tahun 2010 jumlah nelayan tercatat sebanyak 2.16 juta orang. Namun pada tahun 2019 lalu, jumlahnya tercatat hanya 1.83 juta orang. Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah nelayan sebanyak 330.000 orang dalam sepanjang tahun 2010 – 2019.¹⁶

Dalam catatan WALHI, penurunan jumlah nelayan di Indonesia didorong oleh dua hal, yaitu krisis iklim dan ekspansi industri ekstraktif di wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Terkait dengan krisis iklim, nelayan di berbagai wilayah di Indonesia sangat terdampak karena aktivitas menangkap ikan di laut sangat mengandalkan cuaca yang bersahabat. Jika cuaca di laut tidak bersahabat, maka nelayan tidak bisa pergi melaut. Selain itu, krisis iklim membuat nelayan sulit memprediksi cuaca. Selain memperburuk cuaca, gelombang di laut menjadi semakin tinggi akibat krisis iklim. Kondisi ini memaksa nelayan untuk tidak melaut.

Akibat krisis iklim, nelayan di Indonesia hanya bisa pergi melaut selama 180 hari atau enam bulan dalam satu tahun. Hal ini memperburuk kehidupan sosial dan ekonomi nelayan di Indonesia. Kondisi inilah yang memaksa nelayan di Indonesia beralih profesi. Krisis iklim juga telah menyebabkan kematian nelayan di perairan Indonesia terus meningkat. WALHI mencatat pada tahun 2020, jumlah nelayan yang meninggal di laut tercatat sebanyak 251 orang. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang jumlahnya hanya 86 orang.

- **Kemiskinan di wilayah pesisir**

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat tingkat kemiskinan di wilayah pesisir sebesar 4,19 persen, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dari jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 10,86 juta jiwa, 12,5 persen atau 1,3 juta jiwa yang tersebar di 147 kabupaten dan kota di wilayah pesisir. Kemudian tahun 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia mencapai 17,74 juta jiwa. Sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori miskin ekstrem. Kaitannya dengan dampak perubahan iklim, 65% masyarakat Indonesia yang bermukim di wilayah pesisir akan terpengaruh secara langsung, dan terdapat 12.857 desa pesisir yang terancam bencana iklim.

Data kemiskinan tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021. Namun berdasarkan analisis Jaring Nusa, kemiskinan pada tahun 2022 di wilayah pesisir mengalami kenaikan dari 65% menjadi 68%. Dengan demikian, terjadi kenaikan 3 persen kemiskinan di wilayah pesisir Indonesia. Angka ini penyumbang terbesar dari total angka kemiskinan di Indonesia.

¹⁵ <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/11/30/sekitar-1-juta-petani-dan-nelayan-berkurang-di-2030>

¹⁶ <https://www.walhi.or.id/jumlah-nelayan-di-indonesia-terus-menurun-akibat-krisis-iklim-dan-industri-ekstraktif>

SERUAN

Pada Konferensi Tingkat Tinggi Iklim ke 27 atau COP 27 perbincangan tentang *loss and damage* mendominasi pertemuan para delegasi. Lantas bagaimana posisi kerentanan pesisir dan kepulauan Indonesia dan apa pengaruh *loss and damage* bagi Indonesia? Sebagai negara kepulauan di wilayah tropis, Indonesia merupakan negara dengan risiko iklim yang besar. Bencana seperti banjir, kekeringan, angin kencang, tanah longsor, dan kebakaran hutan menjadi lebih sering dan lebih intens terjadi akibat perubahan iklim. Negosiasi iklim sampai sekarang sebagian besar masih berfokus pada perundingan mengenai pengurangan gas rumah kaca, dan bagaimana mengatasi dampak perubahan iklim.

Pada COP 28 di Dubai saat ini, masyarakat sipil menuntut melahirkan satu kesepakatan bahwa negara-negara industri yang paling banyak menyebabkan masalah iklim bertanggung jawab terhadap dampak yang dihasilkan kepada negara-negara yang paling mengalami dampak dan kerugian akibat perubahan iklim, khususnya negara-negara kepulauan. COP 27 di el-Sheikh telah gagal untuk memastikan menjaga temperatur global di batas 1,5 derajat celcius pada 2030, ini merupakan kelanjutan dari kegagalan COP 26 di Glasgow untuk menghentikan penggunaan energi fosil. Pakta Iklim Glasgow adalah kesepakatan iklim yang berencana mengurangi penggunaan batu bara. Namun itu tidak cukup untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius.

TUNTUTAN

1 Kepada pemerintah pusat, Jaring Nusa mendesak untuk segera melakukan evaluasi dan mencabut berbagai regulasi yang memperburuk dampak krisis iklim bagi masyarakat pesisir kawasan Timur Indonesia. Di antara regulasi yang harus segera dicabut adalah UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batubara, PP Penangkapan Ikan Terukur, PP Pengelolaan Sedimentasi di Laut, dan berbagai aturan turunannya.

2 Jaring Nusa KTI mendesak juga mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan berbagai proyek pembangunan yang menghancurkan pesisir dan pulau kecil di Timur Indonesia,

seperti pertambangan nikel di Sulawesi dan Maluku Utara, Pertambangan emas di Sulawesi Utara, Pertambangan Panas Bumi di NTT, dan berbagai tempat di Timur Indonesia, serta menghentikan proyek pembangunan tanggul laut yang mempersulit kehidupan nelayan, sebagaimana terjadi di Sulawesi Tengah dan NTT.

3 Mendesak PBB untuk merumuskan skema pembayaran *loss and damage* bagi masyarakat yang paling terdampak mengesahkan pembayaran *loss and damage* pada masyarakat terdampak, dengan tidak melibatkan Bank Dunia dan lembaga keuangan internasional lainnya yang selama ini terbukti menghancurkan negara-negara selatan. Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia harus pro aktif menyiapkan skema dana *loss and damage* yang memprioritaskan masyarakat terdampak di Kawasan Timur Indonesia.

4 Menyerukan kepada para pemimpin negara-negara kepulauan, penerima dampak signifikan dari krisis iklim, untuk memastikan adanya komitmen dari negara-negara industri di COP 28 untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang diakibatkan oleh perubahan iklim global. Memastikan keikutsertaan masyarakat kepulauan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan mengatasi dampak perubahan iklim global. Perubahan iklim yang telah dirasakan saat ini khususnya oleh negara-negara kepulauan tidak hanya mengancam ruang hidup dan kehidupan penduduk pada wilayah pesisir dan pulau kecil namun juga mengancam kedaulatan negara.

5 Mendesak PBB untuk konsisten mendesak negara-negara utara dan korporasi besar di negara-negara utara untuk menurunkan emisinya sebagaimana disepakati secara global dalam Paris Agreement dan ditargetkan oleh IPCC dibawah 1,5 derajat celcius.

6 Menyerukan kepada masyarakat pesisir di Kawasan Timur Indonesia untuk tetap konsisten melakukan melawan beragam proyek yang memparah krisis iklim, serta melawan berbagai kebijakan yang akan menghancurkan ekosistem pesisir, laut, dan pulau kecil.

